

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN PASAL 34 AYAT (1) DI DESA NANGA TEKUNGAI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

Suparno, Mardawani, Alvonsius Helmi Yahya

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Email: suparnowae4@gmail.com, mardawani113@yahoo.co.id, helmiyahyaalvonsius@gmail.com

Abstract

Poverty remains a structural challenge in rural areas of Indonesia, including Nanga Tekungai Village, Serawai District, Sintang Regency, West Kalimantan. The Indonesian government, through the Family Hope Program (PKH), aims to alleviate poverty while fulfilling the mandate of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution regarding protection for the poor and neglected children. This study aims to examine the implementation of PKH in Nanga Tekungai Village, including its implementation, distribution mechanism, and economic impact on beneficiary families. The research method used is qualitative with a descriptive approach, through in-depth interviews with social facilitators, program implementers, and beneficiary families, supplemented by policy documentation and program reports. The results show that the implementation of PKH in Nanga Tekungai Village has followed guidelines, but still faces obstacles, including limited understanding among beneficiaries about the program's objectives, delayed distribution of assistance, and intensity of facilitation that needs improvement. Nevertheless, PKH has proven to increase access to education and health services for the poor and encourage economic independence. The implementation of PKH in this village has fulfilled the mandate of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution and become an important instrument for social protection at the local level. In conclusion, PKH has had a positive impact on poverty alleviation in Nanga Tekungai Village, although it still requires optimization of several technical aspects and empowerment of beneficiaries. It is hoped that strengthening the capacity of social facilitators and increasing community literacy will make this program more effective in alleviating poverty sustainably.

Keywords: Implementation, Family Hope Program, Poverty Alleviation, Article 34 Paragraph (1)

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi tantangan struktural di desa-desa pedalaman Indonesia, termasuk Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berupaya menanggulangi kemiskinan sekaligus menunaikan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PKH di Desa Nanga Tekungai, meliputi pelaksanaan, mekanisme penyaluran, serta dampak ekonominya bagi masyarakat penerima manfaat (KPM). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu melalui wawancara mendalam kepada pendamping sosial, pelaksana program, serta keluarga penerima manfaat, dilengkapi dokumentasi kebijakan dan laporan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Nanga Tekungai berjalan sesuai pedoman, namun masih terdapat kendala yang dihadapi, di antaranya: keterbatasan pemahaman sebagian penerima manfaat terhadap tujuan program, keterlambatan proses pencairan bantuan, serta intensitas pendampingan yang masih perlu. Meski demikian, PKH terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mulai mendorong kemandirian ekonomi. Implementasi PKH di desa ini secara nyata telah memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan menjadi instrumen penting perlindungan sosial di tingkat lokal. Kesimpulannya, PKH memberikan dampak positif nyata dalam pengentasan kemiskinan di Desa Nanga Tekungai, meskipun masih memerlukan optimalisasi beberapa aspek teknis dan pemberdayaan penerima manfaat. Harapannya, penguatan kapasitas pendamping sosial dan peningkatan literasi masyarakat akan membuat program ini semakin efektif dalam kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 34 Ayat (1)

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang kompleks di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sintang. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasinya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang mendukung keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Di Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, PKH berperan penting sebagai wujud pelaksanaan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. PKH membantu keluarga rentan seperti ibu hamil, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia agar dapat mengakses layanan dasar.

Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kendala administrasi. Keberhasilan PKH sangat ditentukan oleh kolaborasi pemerintah daerah, pendamping PKH, dan partisipasi aktif penerima manfaat.

Desa Nanga Tekungai sendiri terbentuk dari pemekaran Desa Buntut Ponte pada tahun 2007 dengan jumlah penduduk 800 jiwa dan 220 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 36 kepala keluarga tercatat sebagai peserta PKH tahun 2024. Penelitian ini difokuskan

untuk mengkaji implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan amanat konstitusi di Desa Nanga Tekungai.

B. Metode

Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dalam sebuah penelitian. Peneliti akan mengevaluasi semua data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipilih, dengan tujuan untuk menemukan solusi dari masalah penelitian yang ada.

Jadi pada metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Mamik (2015:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Kosma Manurung (2022:287) metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kajian literatur. Deskriptif secara karakteristik bermaksud membantu para peneliti untuk menggambarkan atau mempertajam penjelasan penelitian mereka agar nantinya dapat mempermudah dipahami oleh orang lain yang ingin mengetahui penelitian mereka.

C. Pembahasan dan Hasil

Dari penelitian yang telah dilaksanakan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Bentuk Perwujudan Pasal 34

Ayat (1) Di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang ini di temukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Salah satu inisiatif sosial yang diluncurkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga yang tergolong sangat miskin. Sebagai syarat untuk menerima bantuan tersebut, keluarga penerima diwajibkan memenuhi ketentuan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia di kalangan masyarakat miskin dengan cara pemberian bantuan finansial langsung. Program merupakan kumpulan dari sejumlah proyek yang dirancang secara terkoordinasi. Dengan kata lain, proyek merupakan elemen terkecil dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu, setiap proyek merupakan bagian integral dari

sebuah program. Dalam sebuah program, berbagai aktivitas direncanakan dan diatur dari berbagai aspek, termasuk waktu pelaksanaan serta hubungan dan koordinasi antar kegiatan atau proyek tersebut. Oleh karena itu. Program Keluarga Harapan dirancang untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap layman kesehatan dan pendidikan yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1293 tahun 2016 mengenai Reorganisasi Pelaksanaan PKH Pusat dan Daerah, alokasi PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, termasuk di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Setelah menerima bantuan tunai dari PKH Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, aspek kesehatan, ekonomi serta pendidikan mengalami perubahan, dan tentunya akan berangsur-angsur membaik.

Perubahan yang terjadi terlihat jelas pada kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka tidak hanya memperoleh bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga mendapatkan pelatihan keterampilan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali penerima

manfaat dengan kemampuan yang dapat menunjang kemandirian hidup, sehingga mereka tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses pelaksanaan PKH dilakukan, berdasarkan pedoman Program Keluarga Harapan (2015:33), terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Target penetapan sasaran calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b. Persiapan Daerah
 - c. Pertemuan awal dan validasi
 - d. Penyaluran bantuan
 - e. Pembentukan kelompok peserta Program Keluarga Harapan
 - f. Verifikasi komitmen
 - g. Penangguhan dan pembatalan
 - h. Pemutakhiran data
 - i. Pengaduan
2. Proses Penyaluran Program Keluarga Harapan Di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan tahapan identifikasi, verifikasi data penerima manfaat, hingga pencairan bantuan kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai peserta program. Menurut Arsyad Yolanda dkk (2023:165)

Penyaluran bantuan, dalam proses ini pendamping melibatkan KPM dalam hal pendampingan penerbitan buku rekening dan ATM dari bank penyalur dan rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan yang dimonitoring oleh pendamping pada KPM melalui pertemuan kelompok. Dalam proses rekonsiliasi bantuan pun pendamping memberikan ruang pada KPM juga untuk bertanya dan melaporkan kendala atau masalah yang dirasakan terkait penyaluran bantuan PKH yang kemudian akan dilaporkan oleh pendamping secara berjenjang. Penyaluran ini dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial dan difasilitasi oleh pendamping PKH di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, proses ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga penerima manfaat, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Di Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang yang secara geografis tergolong wilayah terpencil dengan akses transportasi terbatas proses penyaluran PKH menghadapi sejumlah tantangan namun tetap berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan nasional. Proses ini secara garis besar mencakup beberapa tahapan penting, yaitu:

- a. Pendataan dan Verifikasi Awal
- b. Penetapan dan pembentukan kelompok penerima Penyaluran dana
- c. Pendampingan dan edukasi sosial

d. Monitoring dan evaluasi.

3. Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Perekonomian Masyarakat Penerima Bantuan Di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, PKH berperan penting karena mayoritas masyarakat masih hidup dalam kondisi sosial ekonomi rendah.

Dampak positif PKH terlihat pada meningkatnya daya beli, berkurangnya beban pengeluaran, serta munculnya perilaku ekonomi yang lebih produktif. Bantuan tunai tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti makanan, sekolah, dan kesehatan, tetapi juga dialokasikan untuk usaha kecil, beternak, dan aktivitas ekonomi rumah tangga lain yang mendorong perputaran ekonomi lokal.

Menurut Listy Julfani dan Ilham Mirzaya Putra (2024), PKH merupakan jaminan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Selain itu, pendamping PKH berperan penting sebagai fasilitator dan agen perubahan sosial dalam mengarahkan penerima manfaat agar lebih mandiri, sesuai Pedoman Umum PKH (Kemensos, 2015).

Meski demikian, pelaksanaan PKH di desa terpencil masih menghadapi kendala seperti akses terbatas, minimnya infrastruktur, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan stakeholder lokal untuk memaksimalkan manfaat program.

Secara keseluruhan, PKH di Desa Nanga Tekungai telah berkontribusi nyata sebagai jaring pengaman sosial sekaligus pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal.

D. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang

secara umum telah berjalan sesuai pedoman pemerintah pusat. Pelaksanaan program mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat hingga pembinaan oleh pendamping sosial mampu dilaksanakan meskipun menghadapi kendala geografis dan keterbatasan akses informasi.

Proses penyaluran bantuan dilakukan secara sistematis melalui mekanisme non-tunai dengan pendamping PKH berperan penting dalam mendampingi penerima manfaat. Meskipun masih terdapat hambatan teknis seperti keterbatasan layanan perbankan, penyaluran bantuan berlangsung tertib dan teratur sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program.

Dampak PKH terbukti signifikan dalam meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, muncul inisiatif ekonomi sederhana di kalangan penerima menunjukkan adanya potensi menuju kemandirian ekonomi meski peningkatan pendapatan belum optimal.

Dengan demikian, PKH berfungsi tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam mewujudkan amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Agar dampaknya lebih berkelanjutan, diperlukan penguatan pendampingan kewirausahaan, edukasi pengelolaan keuangan, serta dukungan pemerintah

daerah dalam pelatihan dan akses permodalan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Yolandika, Binahayati Rusyidi, and Mohammad Fedryansyah. "Implementasi Pendekatan Berbasis Hak Dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Gorontalo." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 6.1 (2023): 160-170.
- Julfani, Listy, and Ilham Mirzaya Putra. "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6.1 (2024): 591-608.
- Kemensos RI. 2015. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Manurung, K. (2022). Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi. *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 285-300.